

INTISARI

Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK menjadi penting karena merupakan cerminan dari kinerja lembaga pemerintah yang sudah sesuai dengan standar serta mencerminkan akuntabilitas yang baik. Oleh karena itu, keterlibatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini inspektorat menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara mendalam peranan serta faktor-faktor yang mendukung Inspektorat Kota Surakarta dalam membantu Pemerintah Kota Surakarta mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rangka membantu Pemerintah Kota Surakarta mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Surakarta maka Inspektorat Kota Surakarta berperan dalam melakukan beberapa kegiatan di antaranya melakukan reviu terhadap Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), melakukan pemeriksaan secara reguler dan tematik, melakukan reviu atas LKPD, melakukan pembinaan kepada SKPD, melakukan asistensi dalam pengelolaan aset daerah, melakukan pendampingan pemeriksaan BPK, dan melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan dari BPK. Selain itu, faktor-faktor yang mendukung peranan Inspektorat Surakarta yaitu adanya dukungan yang kuat dari pimpinan, adanya pendidikan dan pelatihan sertifikasi jabatan bagi para auditor di inspektorat, adanya dukungan serta respon dari setiap SKPD kepada inspektorat, kompetensi sumber daya manusia yang memadai, prasarana dan sarana yang mendukung, dan objektivitas dan independensi.

Kata kunci: peranan inspektorat, opini wajar tanpa pengecualian, laporan keuangan pemerintah daerah, studi kasus.

ABSTRACT

The Unqualified Opinion (WTP) from the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) is important to reflect the performance of government offices, those which have met the standards and have indicated good accountability. For that reason, the involvement of the Government Internal Supervisory Officers (APIP), in this case the inspectorate, is important. This study aims to identify in depth the role and the factors that support the Inspectorate of Surakarta Municipality in helping the Administration of Surakarta Municipality maintain the unqualified opinion (WTP) of its Financial Statement since 2010 until 2015. This study was a qualitative study with the case study approach. The data were collected from interviews and documents.

The result shows that to support the Administration of Surakarta Municipality to maintain the Unqualified Opinion of the Local Government Financial Statements (LKPD), the Inspectorate of Surakarta Municipality has played a role in a number of activities. They include carrying out a review on Work Plan and Budget (RKA) in every work unit (SKPD), doing regular checks and thematic reviews on the LKPD, guiding the SKPD, assisting the local asset management, assisting the audit performed by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK), and following up the result of the audit from the BPK. In addition, there are other factors that support the role of the Inspectorate such as the strong motivation from the leader, education and training for the certification of the positions of auditors in the inspectorate, support and response from each SKPD to the inspectorate, adequate competence of the human resources, supportive facilities; infrastructures and tools, and objectivity and independence.

Keywords: the role of the inspectorate, unqualified opinion, local government financial statement, case study.